

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Dalam era globalisasi, reformasi dan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, peran akuntansi semakin dibutuhkan, tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (accountability) kepada banyak pihak yang memerlukan, salah satu diantaranya adalah pemerintah. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur. Upaya reformasi dan pengembangannya, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan yang berkesinambungan sangat diperlukan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat (Mardismo, 2004).

Pemerintah daerah dituntut untuk memperbaiki kualitas kinerja keuangan agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum yang menuntut peningkatan akuntabilitas dan transparansi di institusi – institusi pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan yang digunakan

oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut mampu dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi (Andriani,2010).

Laporan keuangan merupakan suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern. Hal ini digunakan untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang reliabel (Tuti Herawati, 2014).

Informasi dalam laporan keuangan banyak yang mengandalkan untuk disajikan oleh pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi tersebut harus mempunyai nilai (Pujiswara 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas

pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo kembali berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut – turut dari Tahun anggaran 2015 sampai tahun anggaran 2018 dari Badan pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Indikator atas tercapainya WTP dari BPK adalah administrasi dan pelaksanaan penata keusahaan keuangan, dari para pengawai dinas, instansi OPD dalam melaksanakan pembangunan dari sisi keuangan.

Opini WTP merupakan pernyataan professional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan pelaksanaana APBD dengan didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatutan terhadap peraturan perundang – undang, dan efektivitas sistem pengendalian internal ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah, dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (PP No.65 Tahun 2010).

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan dalam suatu pemerintahan adalah Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan dalam pemerintahan tersebut. Pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dirancang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sistem pengendalian intern (SPI) memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan suatu laporan keuangan.

Kasus – kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak mentaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perilaku akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian ( susilawati, dkk 2014).

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Marjoni dkk (2018) yang menemukan bahwa bukti Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Syarifuddin (2010) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Juga penelitian Yensi (2014), yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu antara lain Luk kadek dkk (2015) yang meneliti tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. namun penelitian yang dilakukan oleh Daini (2014) memiliki hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas keuangan daerah.

Penelitian ini memodifikasi model penelitian Luk Kadek dkk (2015) menggunakan variabel independen Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD ) dan Sistem Pengendalian Intern. karena dalam suatu pemerintahan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara yang amanah.

Dengan berlatarbelakang uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **”PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS**

## LAPORAN KEUANGAN DI KABUPATEN PONOROGO (STUDI EMPIRIS PADA SKPD KABUPATEN PONOROGO).

### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tentang sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem informasi keuangan daerah Berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap berpengaruh kualitas laporan keuangan ?
3. Apakah sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap Berpengaruh kualitas laporan keuangan?

### 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah variabel diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

- a) Pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
- b) Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

- c) Pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya sebagai berikut :

a) **Universitas**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta menjai bahan bacaan diperpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

b) **Organisasi**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi organisasi terhadap sistem informasi keuangan daerah agar bisa meningkatkan kinerjanya secara terus menerus.

c) **Peneliti**

Memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan setelah melakukan penelitian ini

d) **Peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar.

